



SILABUS
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
(3 SKS)

1. Deskripsi Mata Ajaran

Mata ajaran ini bertujuan agar mahasiswa memahami Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) baik secara konseptual maupun praktikal. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan tentang pengertian, ruang lingkup, dan perbedaan-perbedaan dari Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dengan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya adalah perkembangan akuntansi berbasis akrual. Materi kuliah lainnya adalah mengenai sistem pengendalian baik yang berkaitan dengan akuntansi keuangan maupun dengan pengendalian manajemen serta manajemen kinerja di Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk *active learning* dimana mahasiswa dituntut untuk belajar secara aktif baik dengan membaca buku dan jurnal hingga menyiapkan berbagai tulisan (*paper*) yang akan dipresentasikan dikelas. Perkuliahan juga dilaksanakan dalam bentuk analisa (*analytical learning*) dan diskusi (*discussion*) kasus dimana mahasiswa membahas suatu kasus yang sudah diterbitkan dalam suatu jurnal atau menganalisa perkembangan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Instruksional Umum

Tujuan instruksional umum dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa :

- a. Memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintahan baik secara konseptual maupun praktikal.
- b. Memiliki kemampuan dalam menganalisa dan menguraikan berbagai komponen sub sistem dan sistem pendukung dari sistem akuntansi keuangan pemerintahan.
- c. Memiliki pemahaman yang memadai terhadap proses perencanaan di pemerintahan dan keterkaitannya dengan proses pengelolaan keuangan negara.
- d. Memiliki pemahaman yang memadai terhadap siklus akuntansi keuangan pemerintahan.
- e. Memahami konsep dan praktik dari sistem manajemen kinerja di pemerintahan.
- f. Memahami konsep dan praktik dari sistem pengendalian di pemerintahan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
AKREDITASI A (SK BAN-PT No. 1852/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019)
Gedung F Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus UNRI Gobah
Jalan Pattimura, Pekanbaru – 28131
Telp/WA. 082216254141 E-mail : maks@unri.ac.id

3. Proporsi Penilaian

- | | | |
|----|---|------|
| a. | Sampai Ujian Tengah Semester / UTS (50 %) | |
| - | Aktivitas | 10 % |
| - | Tugas / Paper | 10 % |
| - | Presentasi | 10 % |
| - | UTS | 20% |
| b. | Sampai Ujian Akhir Semester / UAS (50%) | |
| - | Aktivitas | 10 % |
| - | Tugas / Paper | 10 % |
| - | Presentasi | 10 % |
| - | UAS | 20% |

4. Bahan Bacaan

- a. Buku Referensi
- Freeman dan Shoulder, Governmental & Non Profit Accounting, Prentice Hall, 9th ed, 2009 (FS).
 - Michael dan Khumawala, Government & Not-For-Profit Accounting, Willey, 5th ed, 2011 (GK).
 - Bryson, Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization, Jossey-Bass, 3rd ed, 2004 (JB).
 - Kaplan dan Norton, The Balanced Scorecard : Translating Strategy Into Action, Harvard Business School Press, 1996 (KN 1).
 - Kaplan dan Norton, The Strategy Focused Organizations, Harvard Business School Press, 2001 (KN 2).
 - Kaplan dan Norton, Strategy Maps : Converting Intangible Assets Into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, 2001 (KN 3).
 - Kaplan dan Norton, Alignment, Harvard Business School Press, 2006 (KN 4).
 - Robert N. Anthony, Management Control Systems, McGrawhill, 10th ed, 2001 (RA)
 - Theodore H. Poister, Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations, John Willey & Sons, 2003 (THP).
 - Robert Simons, Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy, Prentice Hall, 2000 (RS).
 - International Public Sector Accounting Standard (IPSAS)
- b. Peraturan Perundangan
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
AKREDITASI A (SK BAN-PT No. 1852/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019)
Gedung F Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus UNRI Gobah
Jalan Pattimura, Pekanbaru – 28131
Telp/WA. 082216254141 E-mail : maks@unri.ac.id

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Permenkeu No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KepMenpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Penyusunan Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- PerMenpan No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

c. Jurnal / Kasus

- Jurnal atau kasus diberikan oleh pengajar sesuai dengan topik bahasan dan atau sesuai tugas yang diberikan.

5. Tugas

Tugas untuk mahasiswa diberikan oleh dosen sesuai dengan materi/topik perkuliahan. Bentuk tugas dapat berupa pembahasan jurnal, kasus, membedah peraturan perundang-undangan ataupun bentuk lainnya.

6. Materi Perkuliahan

No	Tanggal	Topik Bahasan Perkuliahan	Bacaan
1		Kontrak Kuliah	
2		<ul style="list-style-type: none">- Overview Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan Negara.- Kerangka Sistem Akuntansi dan Kinerja Pemerintah.	Regulasi terbaru FS : Ch 1-3.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS RIAU
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
AKREDITASI A (SK BAN-PT No. 1852/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019)
 Gedung F Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus UNRI Gobah
 Jalan Pattimura, Pekanbaru – 28131
 Telp/WA. 082216254141 E-mail : maks@unri.ac.id

3		<ul style="list-style-type: none"> - Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. - Pengembangan Standar Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah. - Penugasan Paper dan Presentasi. 	PP 71/2010 IPSAS GAS
4		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat. - Penugasan Paper dan Presentasi. 	Regulasi terbaru JB Ch 1-4 FS Ch 3 GK 15
5		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Akuntansi Pemerintah dan Pelaporan Keuangan diberbagi negara. - Penugasan Paper dan Presentasi. 	FS Ch 13 -15 & Ch 19.
6		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Manajemen Kinerja. - Program Logic Model. 	THP Ch 1 - 3
7		<ul style="list-style-type: none"> - Balanced Scorecard: Sistem Manajemen Kinerja. - Penugasan Paper dan Presentasi. 	Regulasi terbaru KN 1 Ch1 -2 KN2 Ch 5, Ch 7 KN3 Ch 14 - 15 KN4 Ch 1, Ch 6
UTS			
8		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah. 	Regulasi terbaru
9		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. - Penugasan Paper dan Presentasi. 	Regulasi Terbaru
10		<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. - Penugasan Paper dan Presentasi. 	Regulasi terkait dan terupdate PP 71/2010 IPSAS
11		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. - Penugasan Paper dan Presentasi. 	Regulasi terkait dan terupdate
12		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah. 	Regulasi terkait dan terupdate
13		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Pengendalian Manajemen Instansi Pemerintah Daerah. - Penugasan Paper dan Presentasi. 	Regulasi terkait dan terupdate RA Ch 1 RS Ch 14 GK Ch 3
14		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah. - Penugasan Paper dan Presentasi. 	Regulasi terkait dan terupdate
UAS			